

Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Terkait Program Ekowisata di Kelurahan Bontang Baru Kota Bontang

Hilda Annisa Nur Firdausi ^{1*}, Rina Juwita ², Kheyene Molekandella Boer ³

^{1*,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.

Email: hildaannisa468@gmail.com ^{1*}, rinajuwita1704@gmail.com ^{2*}, delux_boer@yahoo.com ³

Histori Artikel:

Dikirim 22 Agustus 2023; *Diterima dalam bentuk revisi* 22 September 2023; *Diterima* 1 November 2023; *Diterbitkan* 10 Januari 2024. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Dalam mewujudkan konsep pemerintahan yang baik, diperlukan adanya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan. Hal ini pemerintah membentuk Pokdarwis sebagai agen pembangunan dalam konteks pariwisata sebagai alat untuk berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan disekitar mereka. Penelitian ini menggunakan Komunikasi Pembangunan sebagai Grand Theory, Komunikasi Partisipatif sebagai Middle Theory, dan konsep servaes yang menggunakan empat indikator Komunikasi partisipatif yaitu, Heteroglasia, Dialogis, Poliponi, dan Karnaval. Penelitian yang bertemakan ekowisata ini menggunakan jenis deskripsi kualitatif dengan teknik *purposive sampling* dengan pemilihan informan yang berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan temuan di lapangan, didapatkan bahwa keempat konsep tersebut sebagian ditemukan dalam praktik komunikasi partisipatif Pokdarwis namun ada juga yang tidak ditemukan dalam artian tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam empat indikator.

Kata Kunci: Pokdarwis; Komunikasi Partisipatif; Konsep Servaes.

Abstract

In realizing the concept of good governance, community participation is needed to participate in development. In this regard, the government formed Pokdarwis as a development agent in the context of tourism as a tool for developing public awareness of the environment around them. This study uses Development Communication as the Grand Theory, Participatory Communication as the Middle Theory, and the service concept that uses four indicators of participatory communication namely, Heteroglasia, Dialogic, Polyphony, and Carnival. This research with the theme of ecotourism uses a type of qualitative description with a purposive sampling technique with the selection of informants based on certain criteria. Based on the findings in the field, it was found that some of the four concepts were found in the Pokdarwis participatory communication practices but some were not found meaning they did not meet the criteria to be included in the four indicators.

Keyword: Pokdarwis; Participatory Communication; Servaes Concept.

1. Pendahuluan

Saat pertama kali dicetuskan pada tahun 1978, Paulo Freire mengatakan bahwa komunikasi partisipatif adalah sebuah konsep dimana semua orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya baik secara individu ataupun kelompok. Mzibi dan Pengzhorn berpendapat bahwa komunikasi partisipatif berperan penting dalam pembangunan yang menjadikan keterlibatan masyarakat sebagai titik fokus yang artinya masyarakat dilibatkan secara aktif dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi, serta dalam pengambilan keputusan [1]. Praktik komunikasi partisipatif memiliki tujuan yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam bidang informasi. Tetapi, juga sebagai alat untuk berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan disekitar mereka. Tumbuhnya kepercayaan diri dan kekuatan masyarakat lokal untuk menghadapi persoalan komunikasi berimbang pada peranan baru komunikasi yang lebih ditekankan pada kebutuhan untuk membantu seluruh proses melalui pertukaran informasi [2]. Tujuan dari diadakannya komunikasi partisipatif sejalan dengan APA yang dicita-citakan oleh gerakan sosial, yaitu terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi seluas mungkin dalam proses pembangunan serta memiliki kebebasan untuk menyuarakan keinginan dan kebutuhannya tanpa bersikap anarkis, justru dengan Cara bekerja Sama dengan pemangku kebijakan yang dalam hal ini disebut ruang public [3].

Praktek komunikasi partisipatif sudah sering diterapkan di masyarakat oleh pemerintah. Biasanya pemerintah menerapkan praktik ini dalam mensosialisasikan program baru yang diusung. Sebagai contoh program reksa dasa, prima tani dan PNPM mandiri pedesaan. Hasilnya, program yang seharusnya merangkul masyarakat dengan pola komunikasi akar rumput ternyata banyak diintervensi oleh pemerintah dan masih sarat dengan prinsip *top-down* [4]. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut apakah sebenarnya praktik komunikasi partisipatif dapat diterapkan oleh kelompok yang berada di masyarakat.

Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji sebuah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terletak di kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang. Pokdarwis merupakan sekumpulan orang yang disatukan dalam sebuah kelompok yang bertugas melakukan pengembangan pariwisata misalnya sebagai agen pembangunan, penerima manfaat, atau sebagai inisiator yang mendorong terjadinya lingkungan kondusif serta tercapainya Sapta Pesona pada wilayah tersebut. Adapun tujuan dari dibentuknya pokdarwis adalah meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya yang dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pariwisata, membentuk masyarakat yang mendukung penuh dan disertai nilai-nilai positif dalam berperilaku sebagai tuan rumah yang berlandaskan Sapta Pesona, serta mengenalkan dan melestarikan potensi daya tarik wisata di daerah masing-masing [5].

Dibentuknya Pokdarwis merupakan bentuk dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam konsep pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata dengan berlandaskan ekonomi dan kultural. Artinya, masyarakat adalah pemeran utama dalam menggerakkan sektor pariwisata serta sebagai penerima manfaat yang terbesar apabila pariwisata tersebut berhasil. Untuk mencapai masyarakat yang berdaya (*empowerment*), masyarakat harus terlebih dahulu diberitahu tentang potensi, peluang, serta kemampuan yang harus mereka miliki guna meningkatkan taraf hidup mereka [6]. Dalam pelaksanaannya, Pokdarwis hanya diberi bantuan hukum dan pembinaan dari pemerintah. Oleh sebab itu, untuk mencapai terjadinya pembangunan kepariwisataan sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat.

Pokdarwis Bontang Baru (Pokdarwis BoBa) yang berdiri sejak 2018 adalah salah satu pokdarwis di Kota Bontang yang mengusung tema ekowisata, yaitu sebuah konsep wisata yang menawarkan kelestarian alam dan budaya. Biasanya ekowisata adalah bagian dari konservasi yang dikemas menjadi tujuan wisata yang diharapkan mampu berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Seperti yang diketahui, Kota Bontang merupakan Kota industri yang dikelilingi oleh tiga perusahaan besar, yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Badak Natural Gas, dan PT. Indominco Mandiri. Keberadaan perusahaan ini memberikan dampak tersendiri bagi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pelestarian lingkungan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan kelestarian alam. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota

Bontang Nomor 13 tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2023 yang bertujuan mewujudkan Kota Bontang sebagai Kota Maritim berkebudayaan industri dengan wawasan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat melalui terpadunya perencanaan tata ruang.

Sebagai bentuk penyeimbangan dan pembangunan berkelanjutan, Kota Bontang terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang bisa dilihat dengan sejumlah destinasi wisata yang berkonsep ekowisata. Hal ini didukung dengan lokasi Kota Bontang yang terletak di daerah pesisir sehingga menghasilkan keindahan alam berupa hutan bakau, sungai, dan pantai yang menawarkan keanekaragaman hayati. Sebagaimana Pokdarwis Bontang Baru yang menjadikan konservasi mangrove sebagai objek wisata baru di Bontang. Bontang Mangrove Park (BMP) pada awalnya adalah wilayah konservasi mangrove yang dikelola oleh Taman Nasional Kutai (TNK). Seiring berjalannya waktu, dengan terbentuknya Pokdarwis dan terpilihnya I Gede Astriawan sebagai ketua, TNK menyetujui agar BMP dikelola oleh masyarakat sekitar. Sejak dikelola oleh pokdarwis, BMP terus berkembang menyediakan berbagai wahana untuk menarik wisatawan, seperti penyediaan Kano dan ketinting, serta tur laut yang memanjakan wisatawan dengan pemandangan industrial di Bontang.

Saat ini, Pokdarwis Boba tidak hanya menawarkan wisata alam, tapi juga wisata religi karena lingkungan bontang baru sendiri memiliki tiga agama mayoritas, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu di mana setiap agama memiliki tempat ibadah yang dapat dijadikan objek wisata. Pokdarwis boba juga turut melakukan pelatihan membuat batik bagi warga sekitar dengan harapan Kelurahan boba mampu memiliki batik dengan ciri khas tersendiri. Selain itu, Pokdarwis Boba turut bekerja sama dengan beberapa UMKM di wilayah bontang baru yang disebut 'Mitra' dengan tujuan sebagai penyedia jasa oleh-oleh bagi wisatawan. Pokdarwis Boba memiliki kegiatan mingguan yang menarik wisatawan lokal yaitu Sunday Morning, di mana masyarakat dapat melakukan senam bersama sambil menikmati bazaar pagi yang menyediakan berbagai jenis jajanan, pernak-pernik, atau menelusuri hutan mangrove.

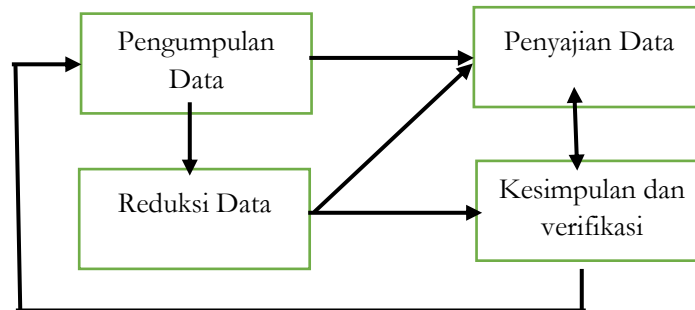
Pada tahun 2022, Pokdarwis Boba mewakili Kota Bontang dalam Lomba Pokdarwis tingkat provinsi di Penajam Paser Utara dan meraih juara tiga dengan program terbaik. Meski begitu, masih banyak yang harus dibenahi oleh Pokdarwis Boba, terutama dalam penarikan jumlah wisatawan yang masih berkutat dalam wisatawan lokal. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah dan pasifnya masyarakat setempat turut andil dalam menurunnya semangat anggota pokdarwis sehingga anggota aktif harus mengeluarkan tenaga lebih banyak untuk mengoptimalkan kegiatan pokdarwis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses komunikasi partisipatif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Bontang Baru tentang Ekowisata.

2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang berada di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memperoleh data. *Key informan* dalam penelitian ini yaitu Ketua Pokdarwis Boba Bersinar yaitu Bapak I Gede Astriawan sebagai ketua dari Pokdarwis Boba bersinar dan Hajar Ratna Sari sebagai Sekretaris dari pokdarwis boba bersinar. Adapun yang akan menjadi informan pendukung ialah Pengendai Ekosistem Hutan Muda dan Koordinator Bontang Mangrove Park, Bapak Sugianur, Kepala Kelurahan Bontang Baru, Bapak Rully Adi Putra, dan Penyewa tenant di Sunday Morning BMP, Ibu Nani.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari jenis data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara kepada ketua Pokdarwis, anggota Pokdarwis, Pengurus TNK selaku mitra dari Pokdarwis, serta masyarakat setempat yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan seperti Ketua RT atau mitra pokdarwis lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini dari dokumen yang dimiliki oleh Pokdarwis Boba Bersinar dalam bentuk video atau gambar. Teknik pengumpulan data yaitu 1) observasi (dengan Cara mengamati dan menulis data yang didapat di lapangan terkait komunikasi partisipatif tentang program konservasi pesut Mahakam). 2) Wawancara dengan *key informan* peneliti adalah Bapak I Gede Astriawan. 3) Dokumentasi seperti gambar dan video yang didapatkan dari dokumen pribadi anggota Pokdarwis serta yang terdapat di

laman facebook Pokdarwis. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menggambarkan kesimpulan atau verifikasi.



Gambar 1. Analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Peneliti telah melakukan kunjungan dalam rangka penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi baik dengan pengambilan gambar secara mandiri maupun melalui sosial media yang berhubungan dengan Pokdarwis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah dibuat. Pemilihan *key informan* dan informan pendukung didasarkan pada pemenuhan kriteria oleh calon informan.

3.1.1 Komunikasi Partisipatif

Berdasarkan fokus penelitian, penulis menggunakan komunikasi partisipatif untuk mengetahui sejauh APA penerapan komunikasi partisipatif yang diterapkan oleh Pokdarwis Boba Bersinar tentang ekowisata di Kelurahan Bontang Baru. Adapun partisipatif yang dimaksud dalam hal ini adalah terlibatnya warga Bontang Baru dalam kegiatan dan program yang dijalankan oleh Pokdarwis. Dalam hal ini, komunikasi partisipatif yang dilakukan oleh Pokdarwis kepada masyarakat Bontang Baru terlihat dari kemitraan yang dilakukan oleh Pokdarwis dengan UMKM, komunitas, dan pihak swasta. Namun, hal ini masih sarat dengan konsep komunikasi satu arah oleh pokdarwis terutama dalam penerapan program ke masyarakat. Hal ini Akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan berikut.

3.1.2 Indikator Komunikasi Partisipatif: Heteroglasia

Heteroglasia menekankan pada partisipasi dari anggota kelompok dari latar belakang yang berbeda-beda atau heterogen. Biasanya dalam suatu kelompok masyarakat terdapat anggota kelompok yang berasal dari lingkup sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, Indikator heteroglasia akan menunjukkan apakah suatu kelompok masyarakat memberikan ruang partisipasi dari anggota kelompok yang beragam latar belakangnya.

Latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam tidak hanya dilihat dari anggota Pokdarwis Bontang Baru Bersinar. Namun juga dilihat dari pendekatan mereka soal ekowisata terhadap masyarakat Bontang Baru dan mitra-mitra mereka yang juga beragam. Dalam hal keanggotaan, Pokdarwis telah memenuhi indikator heteroglasia yang anggotanya memiliki latar belakang pendidikan, agama, dan ekonomi yang berbeda. Hal ini diungkapkan oleh Hajar Ratna Sari dalam kutipan berikut:

“Penunjukan saat itu tidak ada batasan umur tapi sudah cakap dalam berpikir. Cuma untuk syarat tertentu hanya diminta untuk berkomitmen dalam Pokdarwis. Karena kemarin itu ada lulusan SD mungkin memang tidak mendukung dalam hal struktural tapi kita perlu dia sebagai dukungan dalam hal lain misal tenaga, bantu kami dalam tata ruang, dan lain-lain” (Wawancara 4 Maret 2023).

Hajar Ratna Sari sendiri merupakan seorang lulusan diploma, sedangkan Ketua Pokdarwis, I Gede Astriawan lulusan Sarjana. Dapat disimpulkan bahwa jarak dan latar belakang pendidikan tak memengaruhi dalam perekrutan pokdarwis saat itu, karena yang diperlukan hanyalah komitmen untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan pokdarwis. Selain itu, dalam latar belakang ekonomi, pekerjaan anggota pokdarwis pun berbeda-beda. Ada yang merupakan wiraswasta yaitu I Gede Astriawan, karyawan swasta, pegawai kelurahan, hingga karyawan BUMN. Sedangkan dalam hal kemitraan, Pokdarwis sudah memenuhi indikator heteroglasia, sebagaimana yang dikatakan oleh I Gede Astriawan sebagai berikut:

“Yang terlibat di ekowisata pokdarwis itu banyak ya. Ada TNK, Organisasi Pramuka, pihak swasta, sampai komunitas Pecinta Lingkungan” (wawancara 27 Februari 2023).

Dari kutipan diatas, I Gede menyebutkan beberapa pihak yang terlibat dalam program ekowisata. Khususnya TNK yang sejak awal merupakan pencetus ekowisata di Bontang Baru. Setelah kemunculan BMP, komunitas serta pihak swasta tertarik untuk turut serta dalam pelestarian lingkungan. Hal ini didukung dengan adanya CSR dari perusahaan serta kewajiban mereka untuk melakukan pertanggungjawaban kepada lingkungan. Sebagai mitra terbesar dari Pokdarwis, Koordinator BMP, Sugianur dalam hal kerjasama yang dilakukan dengan Pokdarwis mengatakan:

“Bentuk kerjasamanya dengan Pokdarwis itu peningkatan kapasitas seperti membuat, dengan harapan ada produk keluar untuk layak jual. Kami ada anggaran tiap tahun untuk dialokasikan ke Pokdarwis termasuk recycle sampah dan lain-lain,” (Wawancara 1 Maret 2023).



Gambar 2. BMP sebagai Mitra Pokdarwis
Sumber: Bontang City Tourism, 2022

Sementara itu, pelibatan pemerintah dalam kegiatan Pokdarwis lebih terlihat pada bantuan pengadaan barang, sebagaimana yang dikatakan oleh Lurah Bontang Baru, Rully Adi Putra dalam kutipan wawancara berikut:

“Secara alokasi anggaran itu memang tidak ada. Tapi di tahun 2021 kita support untuk pakaian mereka. Kendaraan misal mereka butuh, sound system, kemudian ke karang taruna mereka perlu angklung, kami sediakan,” (Wawancara 28 Februari 2023)

Dari wawancara diatas, dapat kita lihat bahwa pemerintah yang diwakili oleh kelurahan turut berpartisipasi dalam kegiatan pokdarwis, namun tidak banyak terlibat dalam program pokdarwis. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam program ekowisata bisa dilihat pada kutipan berikut:

“Kegiatan Sunday morning ini dilakukan hanya seminggu sekali untuk menunjang pendapatan umkm. Kalau saya jualan di lapak ini dan pujaera juga. Waktu itu kami ditawarkan untuk berjualan, di share di grup RT info tawaran ini. Disini yang diutamakan warga Bontang Baru dan Bontang Kuala, kalau enggak ada baru ditawarkan ke masyarakat umum, biasa disini ramai penjual,” (Bu Nani, wawancara 5 Maret 2023).

Dari wawancara bersama warga Bontang Baru, dikatakan bahwa adanya *Sunday Morning* dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan UMKM. Hal ini sejalan dengan APA yang yang

diharapkan Akan hadirnya ekowisata di tengah-tengah yakni mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, ada juga hubungan antara masyarakat dan pokdarwis yang tidak sesuai dengan konsep heteroglasia yang tidak memandang latar belakang seseorang untuk dapat memberi kesempatan yang Sama dalam bersuara. Dalam kasus tertentu, Pokdarwis tidak diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan program ekowisata karena tidak memakai baju seragam dengan logo pemkot Bontang. Sebagaimana yang disampaikan oleh I Gede Astriawan dalam wawancara berikut:

“Saya sosialisasi di Tanjung Limau dianggap orang gila, makanya kami pakai seragam. Karena mereka bilang kalau enggak ada duitnya enggak bisa, susah. Kami pakai seragam biar didengar dengan warga sana,” (Wawancara 28 februari 2023).

Dari kalimat kutipan diatas, bisa dilihat bahwa ada bagian masyarakat Bontang Baru yang masih mementingkan latar belakang seseorang untuk mereka dengarkan. Berdasarkan kutipan beberapa wawancara diatas dapat kita pahami bahwa indikator heteroglasia terdapat dalam pola komunikasi partisipatif yang diterapkan oleh Pokdarwis dalam menjalankan program ekowisata di Kelurahan Bontang Baru, namun tidak selalu ada. Hal ini dapat terlihat dari beragamnya latar belakang yang terlibat dalam program ekowisata, seperti warga yang ikut berjualan dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian, pihak pokdarwis yang menyelenggarakan acara dan menyebarluaskan ke masyarakat melalui sosial media, pihak pemerintahan melalui kelurahan yang membantu dalam pengadaan barang, serta pihak kemitraan yang bersedia mengalokasikan dana khusus untuk perkembangan program Pokdarwis.

Sementara itu, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis setelah melakukan kunjungan, memang benar terdapat konsep heteroglasia di dalam anggota internal pokdarwis. Penulis mengamati bahwa terdapat perbedaan gender tidak mengakibatkan adanya diskriminasi dalam komunikasi sesama anggota pokdarwis. Begitu pula dalam hal latar belakang ekonomi yang berbeda, di mana hal ini ditunjukkan beragamnya jenis profesi yang dijalankan oleh anggota pokdarwis.

Hal yang Sama ditunjukkan dengan perbedaan latar belakang pendidikan dan agama, yang mana anggota pokdarwis memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, mulai dari SD hingga Sarjana. Adapun dalam hal agama ditunjukkan dengan Ketua Pokdarwis yang beragama Hindu dan beranggotakan orang dengan agama Islam. Semua perbedaan ini tidak menghalangi proses interaksi dan komunikasi dalam internal pokdarwis yang mana hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikator heteroglasia didalamnya.



Gambar 3. Anggota Pokdarwis Saat Penanam Mangrove

Sumber: Facebook Pokdarwis, 2022

Sayangnya, penulis tidak bisa mendapati secara langsung interaksi yang terjadi antara pokdarwis dan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh *Key Informan* bahwa ada ketidaksesuaian dengan indikator heteroglasia dalam interaksi ini. Pada indikator heteroglasia seharusnya tidak memandang latar belakang seseorang. Namun, di salah satu zona Bontang Baru, terdapat masyarakat yang terbiasa

memandang pelaku interaksi dari latar belakang profesi. Walaupun penulis tidak mendapati secara langsung setelah melakukan kunjungan, tidak ada kegiatan pokdarwis yang melibatkan masyarakat di zona tersebut. Akan tetapi, penulis mengasumsikan bahwa pernyataan *key informan* memang valid, sebab dikatakan oleh dua *key informan* berbeda pada kesempatan wawancara yang berbeda.

Tabel 1. Sintesa Heteroglasia dan Temuan di Lapangan

Teoritis	Hasil Temuan di Lapangan
Untuk mewujudkan konsep pembangunan yang baik harus melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang berbeda yang dalam hal ini adalah perbedaan budaya, agama, ekonomi, bahkan bahasa namun mampu untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan.	<ul style="list-style-type: none"> a) Pokdarwis Boba Bersinar berhasil melibatkan banyak pihak seperti masyarakat, kemitraan dengan lembaga pemerintahan, hingga pihak swasta untuk berpartisipasi dalam program ekowisata. b) Anggota internal Pokdarwis Boba Bersinar terdiri dari berbagai latar yang berbeda. c) Anggota internal Pokdarwis Boba Bersinar terdiri dari tingkat pendidikan yang berbeda. d) Anggota Internal Pokdarwis Boba Bersinar berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda. e) Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan Sunday Morning yang diadakan oleh Pokdarwis. f) Kemitraan Pokdarwis bersedia mengalokasikan Dana khusus untuk mewujudkan konsep pembangunan yang baik harus melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang berbeda yang dalam hal ini adalah perbedaan budaya, agama, ekonomi, bahkan bahasa namun mampu untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. UK pengembangan dan pemberdayaan pokdarwis. g) Pemerintah melalui kelurahan membantu dalam hal pengadaan barang. h) Masih ada masyarakat yang mementingkan latar belakang.

3.1.3 Indikator Komunikasi Partisipatif: Dialogis

Indikator dialogis menekankan pada hubungan antara pembawa pesan dan penerima pesan. Sederhananya, indikator ini melihat apakah dalam suatu kelompok masyarakat terdapat interaksi atau keterlibatan semua orang dalam proses komunikasi untuk mencapai tujuan kelompok. Indikator dialogis mengacu pada penghormatan terhadap hak bicara sesama anggota dan bentuk interaksi mereka dalam membangun kepercayaan satu sama lain. Indikator ini juga menunjukkan apakah suatu kelompok masyarakat dapat menyelesaikan masalah melalui interaksi dan komunikasi yang baik antar anggota sebagai sebuah subyek, bukan hanya sebagai objek komunikasi (Servaes dalam Rahim 2004). Pada kasus ekowisata Bontang Baru, kita dapat melihat indikator ini berlangsung dalam berbagai bentuk interaksi, seperti antara anggota Pokdarwis, Kelurahan dan Pokdarwis, antara Pokdarwis dan Mitra, serta interaksi yang terjadi antara Pokdarwis dan masyarakat.

Dalam penerapan konsep dialogis di internal Pokdarwis, pada saat rapat setiap divisi dan Badan Pengurus Harian diwajibkan untuk menyampaikan satu program kerja, yang selanjutnya akan didiskusikan kembali akan masuk ke dalam program kerja berjangka. Baik itu pendek, menengah, atau panjang. Seperti yang diucapkan oleh Hajar Ratna Sari dalam kutipan wawancara berikut:

“Cara pengusulan program setiap divisi dan wajib mengusulkan proker. Setelah itu kami rapat pleno proker mana yang bisa berjalan karena jujur selama ini beberapa program belum berjalan.” (Wawancara 4 Maret 2023)

Dari kutipan diatas, indikator dialogis dari komunikasi partisipatif tercipta pada saat rapat internal dengan mewajibkan setiap divisi untuk mengajukan program kerja yang kemudian dirapatkan bersama.



Gambar 4. Rapat Pokdarwis
Sumber: Facebook Pokdarwis, 2022

Selain itu, untuk mengatasi perbedaan pendapat saat rapat, I Gede Astriawan selaku ketua selalu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap pendapat yang akhirnya mempengaruhi anggota pokdarwis dalam menghadapi perbedaan pendapat. Seperti yang disampaikan oleh hajar dalam kutipan berikut:

“Jadi dalam penyelesaiannya beliau menampung dan mencari solusi dari setiap permasalahan. Misalkan ada dua pendapat, beliau cari plus minus-nya dan beliau menularkan itu ke kita. Kedua, jika salah satu memiliki banyak kelebihan itu yang kita ambil dengan catatan pendapat yang tertolak kemungkinan akan digunakan di kegiatan lain,” (Wawancara 4 Maret 2023).

I Gede Astriawan juga dalam menyelesaikan masalah internal Pokdarwis juga tidak melibatkan forum dan cenderung melakukan percakapan personal. Penolakan pendapat juga dilakukan dengan tidak menyalahkan pendapat anggota. Contohnya dalam kutipan dibawah ini:

“Lebih ke negosiasi secara personal, dan ketika ada masalah antar anggota beliau tidak melibatkan forum. Makanya Pak Gede selalu chat personal kalau pendapat anggotanya enggak diterima dan mengatakan kalau pendapat kamu itu gak salah dan itu sudah tugas pengurus inti,” (wawancara 4 maret 2023).

Dari kutipan diatas, kita bisa melihat bahwa I Gede Astriawan menerapkan pendekatan komunikasi persuasif kepada anggota internal apabila terjadi perbedaan pendapat. Adapun dalam konteks dialogis ke masyarakat, Pokdarwis melakukan dialog dengan Cara sosialisasi program dan gencar melakukan penyebaran informasi melalui grup kelurahan. Meskipun pertemuan dengan masyarakat tidak menyeluruh, namun kegiatan ini dikhususkan kepada masyarakat tertentu. Sebagaimana yang disampaikan oleh I Gede Astriawan dalam kutipan berikut:

“Misal untuk kelompok nelayan, kami pinjam gedung perikanan untuk melakukan penyuluhan dampak wisata terhadap Tanjung Limau. Jadi kami minta untuk sampah disana diurus, saya bilang juga ke pemerintah malu bawa tamu keliling sampahnya berserakan.” (Wawancara 28 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan diatas, dalam mewujudkan ekowisata diperlukan adanya kesadaran masyarakat Akan kebersihan lingkungan, karena lingkungan yang nyaman menjadi faktor penting untuk menarik wisatawan. Sementara itu, contoh lain dalam kegiatan mingguan seperti Sunday Morning hanya bisa dilakukan apabila hari cerah. Jika sedang hujan, kegiatan ditiadakan dan sebagai gantinya, Pokdarwis mempromosikan lapak masyarakat yang berjualan di laman sosial media baik *Facebook* maupun *Instagram*. Hal ini sesuai dengan APA yang disebutkan oleh Hajar Ratna Sari dalam kutipan berikut:

“Kalau hujan kami putuskan tidak ada aktivitas yang kami infokan di grup, dan sebagai gantinya kami promosikan jualan masyarakat lewat facebook dan lain-lain.” (Wawancara 4 Maret 2023).

Hal ini berarti, Pokdarwis berupaya untuk terus menyampaikan keadaan yang terjadi tanpa harus merugikan salah satu pihak. Sementara itu dalam hal kemitraan Pokdarwis, biasanya untuk pengajuan proposal yang terkait dengan ekowisata biasanya dilakukan dengan bantuan TNK untuk memasukkan proposal ke perusahaan yang bekerja Sama dengan TNK. Sementara untuk kelengkapan wisata seperti kapal dan Kano, pokdarwis mengajukan sendiri ke perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh I Gede Astriawan berikut ini:

“Untuk pengadaan sarana pendukung seperti kapal, kano, dan bibit untuk kegiatan urban farming kami mengajukan ke perusahaan. Tapi untuk kegiatan di BMP kami minta tolong ke TNK yang nantinya Akan mereka sampaikan ke perusahaan seperti Pertamina atau Indominco. Nah, nanti Lembar Pertanggung Jawaban kami kasih ke perusahaan terkait dan logonya akan disertakan di kawasan ekowisata.” (Wawancara 28 Februari 2023).

Dari pernyataan diatas, dapat kita lihat bahwa dialog yang tercipta antara Pokdarwis dan kemitraannya berjalan cukup baik terutama dalam pemanfaat ekowisata. Adapun indikator dialog dengan kelurahan belum berjalan dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Bontang Baru, Rully Adi Putra dalam kutipan wawancara berikut:

“Untuk program pokdarwis, biasanya kami diberitahukan terakhir menginfokan mereka perlunya APA nanti kita bantu. Karena mereka beda dengan karang taruna dan pkk yang diubah kelurahan langsung. Ibaratnya mereka anaknya dispopar cuman berteman dengan mereka,” (wawancara 28 Februari 2023). “

Bisa dipahami bahwa kelurahan tidak dilibatkan dalam pembuatan program oleh Pokdarwis. Kelurahan juga terlihat tidak ingin banyak terlibat karena Pokdarwis tidak berada dibawah Kelurahan. Selain itu, Kelurahan juga meminta kepada Dispopar untuk tidak melimpahkan semuanya ke kelurahan. Sebagaimana yang tercantum dalam kutipan berikut:

“...beberapa kali juga saya sampaikan ke dispopar jangan semuanya dibebankan ke kelurahan karena kita harus tau dulu NIH, jadi kami bantu secukupnya. Jadi apa yang mereka butuhkan mereka bilang, kalo bisa saya support, saya bantu, kalau enggak saya bilang enggak.” (Wawancara 28 Februari 2023)

Dari uraian singkat tadi, Kelurahan menyebutkan untuk membantu secukupnya. Dalam hal ini adalah bentuk bantuan berupa pengadaan barang atau membantu mempromosikan kegiatan Pokdarwis melalui akun Instagram PPID kelurahan. Berdasarkan beberapa kutipan dalam wawancara diatas, bisa dilihat bahwa terdapat indikator dialogis dalam komunikasi partisipatif yang dilakukan oleh Pokdarwis di kalangan masyarakat, anggota internal, hingga kemitraan, namun tidak berjalan baik dengan kelurahan.

Selama observasi di lapangan, Penulis melihat terdapat sentimen tersendiri antara pokdarwis dan pemerintahan. Menurut penulis, hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman proses terbentuknya pokdarwis. Pokdarwis merasa meskipun Surat keputusan terbentuknya dibuat oleh Dispopar, namun mereka tetap menjadi binaan dari kelurahan dan setara dengan binaan kelurahan lain seperti Karang Taruna dan PKK. Namun, kelurahan beranggapan bahwa pokdarwis adalah mitra, berbeda dengan Karang Taruna dan PKK, serta pokdariwis dibebaskan untuk menjadi mandiri.

Sementara itu, dialog yang terjadi antara masyarakat dan pokdarwis terlihat *top-down*. Masyarakat tidak dilibatkan dalam program kerja yang pokdarwis buat, namun mengharapkan masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan program dengan melakukan sosialisasi dan penawaran. Pokdarwis melakukan fiksasi program terlebih dahulu baru kemudian diberitahukan kepada masyarakat untuk bergabung. Adapun dialog yang terjadi antara pokdarwis dan kemitraan berjalan dengan baik, yang terlihat dari timbal balik antara pokdarwis dan mitra. Dalam hal ini, pokdarwis tak segan untuk

meminta bantuan mitra untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat baik dengan bentuk dukungan berupa pengadaan barang atau Dana.

Tabel 2. Sintesa Dialogis secara teoretis dan Hasil temuan lapangan

Teoritis	Hasil di Lapangan
Indikator dialogis adalah indikator komunikasi partisipatif di mana pengirim dan penerima pesan terjadi interaksi untuk mencapai tujuan yang sama.	<ul style="list-style-type: none">a) Pokdarwis menjalankan dialog terkait anggota internal, masyarakat, kemitraan, namun tidak berjalan baik dengan kelurahan.b) Pokdarwis melakukan sosialisasi ke masyarakat meskipun belum menyeluruh namun tepat sasaran.c) Pokdarwis terus melakukan upaya memberi <i>feedback</i> kepada wargad) Ketua Pokdarwis melakukan pendekatan komunikasi persuasive personal dalam menyelesaikan masalah internale) Dalam perbedaan pendapat, Pokdarwis menampung segala ide dan mempertimbangkan dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendapat.f) Pokdarwis berdialog dengan kemitraan terutama dalam hal yang berkaitan dengan peningkatan ekowisata

3.1.4 Indikator Pendekatan Komunikasi Partisipatif: Poliponi

Indikator poliponi merupakan bentuk lanjutan dari indikator dialogis. Poliponi menekankan pada adanya kesempatan yang Sama bagi setiap anggota dalam mengutarakan pendapatnya tanpa mendapat tekanan atau intervensi apapun dalam menyampaikannya. Artinya, dalam suatu kelompok bisa jadi ada berbagai macam suara atau gagasan yang berbeda, tapi dalam praktiknya berbagai gagasan tersebut justru memberikan ruang yang memperkuat tujuan kelompok (Servaes dalam Rahim 2004). Poliponi mengindikasikan adanya ruang yang ideal bagi anggota dalam bersuara, entah dalam menyampaikan saran ataupun kritik. Poliponi juga menjadi tanda bahwa semua pendapat memiliki kesempatan diakomodasi untuk kemajuan kolektif. Poliponi menekankan bahwa suara-suara yang berbeda dapat disatukan tanpa menjadikan perbedaan pendapat sebagai suatu masalah.

Pada kasus ekowisata Bontang Baru, indikator ini terlihat baik dalam hubungan antar anggota Pokdarwis, serta antara Pokdarwis dan Mitra. Penulis menemukan dalam kepemimpinan Pokdarwis, tidak terdapat intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam menyampaikan pendapat dan gagasan, begitupun dalam hubungan antara Pokdarwis dengan mitra, tidak ada tekanan apapun dalam mengomunikasikan tujuan dan kegiatan ekowisata baik dari Pokdarwis ataupun dari mitra. Selain itu dalam hal komunikasi, Pokdarwis memberikan ruang diskusi antar anggotanya, serta menampung segala macam bentuk gagasan dari anggota sebagaimana yang juga dijelaskan dalam indikator dialogis. Selain itu hubungan komunikasi antara Pokdarwis dan mitra-mitra juga dapat dibilang ideal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sugianur sebagai Pejabat TNK dan Koordinator BMP berikut ini:

“Bentuk kerjasamanya dengan Pokdarwis itu peningkatan kapasitas seperti membatik, dengan harapan ada produk keluar untuk layak jual. Kami ada anggaran tiap tahun untuk berapa lokasi untuk peningkatan kapasitas Pokdarwis termasuk recycle sampah dan lain-lain. Kami juga menawarkan mereka maunya apa.” (Wawancara, 28 Februari 2023).



Gambar 5. Pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan membuat

Sumber: Facebook Pokdarwis, 2022

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat kita pahami bahwa ada ruang komunikasi yang dibentuk oleh Pokdarwis dengan mitranya untuk saling mendengarkan gagasan-gagasan satu Sama lain yang sesuai dengan konsep poliponi. Namun pada hubungan antara Pokdarwis dengan pemerintah, dan hubungan antara Pokdarwis dengan masyarakat, indikator poliponi tidak begitu sesuai.

Komunikasi yang terjalin antara Pokdarwis dan pemerintah tampak tidak ideal. Pihak Pokdarwis merasa bahwa pemerintah tidak memberikan dukungan yang layak kepada APA yang mereka usahakan, padahal sejatinya mereka adalah kelompok yang dibentuk oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Sebagaimana yang disampaikan oleh I Gede Astriawan:

“Ini yang saya sampaikan ya untuk sentilan ke pemerintah, kalau program pariwisata itu memang tujuan pemerintah, tapi mereka tidak menciptakan destinasi yang bisa buat orang terkesan. Kalau disini kita masih fokus ke event, kalau event sekali udah kelar gak sustain. Nggak salah memang, tapi kalo yang dibuat destinasi wisata, suatu saat orang Akan balik lagi ke Bontang. Saya harap pemerintah banyak membantu untuk kami pelaku pariwisata dengan support.” (Wawancara, 28 Februari 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas nampak bahwa ada ketidaksesuaian dengan konsep poliponi yang memberikan kesempatan untuk mengakomodasi setiap masukan yang disampaikan. Pemerintah seakan tidak memberikan perhatian kepada gagasan yang diberikan Pokdarwis dan tidak memberikan ruang bagi Pokdarwis untuk menyampaikan gagasannya dengan ideal. Selain perihal dukungan, Ketua Pokdarwis, I Gede Astriawan juga berpendapat bahwa pemerintah menggunakan anggaran dengan kurang bijak.

“Kalau kita lihat anggaran jalan-jalan keluar Bimtek (Bimbingan Teknis) sampai 500 juta, mending buat tempat rekreasi (di Bontang Baru), Mending undang narsumnya ke Bontang, di sini dihabiskan paling 20 juta udah mewah. Kalau 20 orang datang ke Jawa, ya sayang (uangnya).” (Wawancara, 28 Februari 2023)

Walaupun tampak tidak ada intervensi dari pemerintah dalam hal menyampaikan gagasan, tapi tampak ada rasa sungkan dan segan dari Pokdarwis dalam menyampaikan hal sensitif seperti anggaran secara langsung. Artinya tidak ada ruang komunikasi (diskusi) yang ideal antara Pokdarwis dan pemerintah, seakan ada jarak antara kedua belah pihak untuk saling berbicara secara setara. Kemudian I Gede Astriawan mendukung pernyataan sebelumnya:

“Saya lihat pemerintah Bontang belum satu visi untuk mewujudkan pariwisata Bontang. Harus sinergi mulai dari Menteri, Gubernur, sampai Walikota, tapi yang kita lihat di lapangan, yang dibawah-bawah ini, haduh. Jadi kami mesti upaya sendiri dengan swadaya sendiri meyakinkan warga. Andai kami dianggarkan untuk pelaksanaan wisata. Saya dengar ada dianggarkan tapi gak tau jatuhnya kemana.” (Wawancara, 28 Februari 2023)

Menurut I Gede Astriawan, Pokdarwis seperti berjalan sendiri tanpa perhatian pemerintah. Ada ketidakselarasan visi antara Pokdarwis dan pemerintah Bontang dalam pengembangan pariwisata,

lebih jauh lagi, memang harus ada kesamaan visi mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah Kota dalam menjalankan program pembangunan ekowisata. I Gede juga menunjukkan kontradiktifnya perlakuan pemerintah terhadap keberhasilan yang dicapai oleh Pokdarwis Bontang Baru Bersinar.

“Yang masalah itu, setiap ada lomba mereka (pemerintah) jual kami. Kalau ada lomba mereka nggak support. Giliran menang, masuk namanya Dinas Pariwisata ini, Kan itu menjual. Pas awal merintis mana? Malahing tuh di-support 100 % Sama PKT, semua PKT yang bangun. Terus langsung ada labelnya Dinas Pariwisata. Nah, ini judulnya kurangnya keseriusan pemerintah dalam membangun Bontang sebagai Kota Pariwisata.” (Wawancara, 28 Februari 2023)

Terlihat melalui pernyataan Ketua Pokdarwis Bontang Baru Bersinar di atas, bahwa hubungan antara Pokdarwis dengan pemerintah tidak terjalin secara ideal. Pemerintah seperti tidak membentuk ruang diskusi yang bisa menampung berbagai gagasan dan suara berbeda dari bawah.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Lurah Bontang Baru, Rully Adi Putra yang menyebutkan bahwa ia telah meminta ke Dispopar untuk tidak melimpahkan semua urusan ke kelurahan. Pada sisi lain, hubungan komunikasi yang terjalin antara Pokdarwis dan masyarakat juga kurang sesuai dengan prinsip poliponi. Pokdarwis kurang melibatkan masyarakat dalam berdialog, sebab mereka melakukan pola komunikasi top-down, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hajar, Sekertaris Pokdarwis Bontang Baru Bersinar:

“Sosialisasi ke warga mostly formal. Sebagian warga lebih percaya ke orang yang berseragam karena dianggap berkuasa, kalau pakai biasa bisa dimintain uang sama mereka. Respon masyarakat lain welcome aja sih kayak nurut aja memberi izin. Jadi ada beberapa RT yang bahasanya nggak melarang, selama kegiatan itu positif dan tidak mengganggu sarana fasilitas di lingkungan mereka. Untuk yang pegawai mereka berpartisipasi sebagai penikmat, sebagai pengunjung, konsumen, dan ada masyarakat yang masuk ke mitra kami ya. Beliau perlu feedback dari kami untuk promosikan usaha beliau. Untuk kegiatan itu msyarakat mendukung asal kegiatannya tepat. Jadi untuk Sunday Morning itu kami kumpulkan semua RT-nya, dan kami buat Surat Keramaian tembusan Polres, dan surat izin Lurah, dan Walikota, jadi aman untuk administrasinya. Komunikasinya top-down, dan biasanya kami mau kegiatan kami tawarkan ke warga dulu.” (Wawancara, 28 Februari 2023)

Dikatakan bahwa komunikasi yang terjalin antara Pokdarwis dan masyarakat Bontang Baru kebanyakan bersifat formal dan top-down. Maksud dari top-down adalah komunikasi dilakukan dari atas ke bawah, dalam hal ini yang di atas adalah Pokdarwis selaku komunikator dan masyarakat ada dibawah selaku komunikan. Dalam komunikasi top-down biasanya hanya terjadi pengiriman pesan dari komunikator (atas) kepada komunikan (bawah) tanpa adanya dialog. Walaupun biasanya masih ada gagasan masuk berupa *feedback*, namun komunikan tidak punya kuasa untuk memaksakan masukkannya kepada komunikator, sebab memang hampir tidak dilibatkan dalam proses perumusan pesannya. Hal ini menunjukkan bahwa Cara komunikasi yang dilakukan oleh Pokdarwis kepada masyarakat masih belum memenuhi indikator poliponi, sebab belum memberikan ruang diskusi yang ideal pada masyarakat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang majemuk.

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan oleh penulis, terlihat bahwa tidak terlihat adanya intervensi dari pemerintah karena pokdarwis hanya diberi mandat untuk melaksanakan tugas, namun tidak diberi pembinaan. Surat keputusan yang dikeluarkan pemerintah hanya sebagai bentuk perlindungan dan kelegalan aktivitas pokdarwis. Selain itu, terlihat jelas kekecewaan dari pokdarwis Akan sikap pemerintah yang lepas tangan terhadap program kerja pokdarwis dan kurangnya apresiasi pada prestasi yang telah dicapai oleh pokdarwis.

Sementara itu hubungan yang terjadi antara pokdarwis dan kemitraan dalam indikator poliponi terlihat dari kemitraan yang menawarkan kebutuhan APA saja yang dibutuhkan pokdarwis guna menunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3. Sintesa Poliponi Secara Teoretis Dan Hasil Temuan Lapangan

Teoretis	Hasil Temuan Lapangan
Indikator poliponi menunjukkan bahwa dalam sebuah kelompok masyarakat harus bisa mengakomodasi ruang yang ideal bagi anggotanya untuk mengemukakan gagasan-gagasan mereka yang majemuk.	<p>a) Dalam kepengurusan Pokdarwis, tidak terdapat intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam menyampaikan pendapat dan gagasan, begitupun dalam hubungan antara Pokdarwis dengan mitra, tidak ada tekanan apapun dalam mengomunikasikan tujuan dan kegiatan ekowisata baik dari Pokdarwis ataupun dari mitra. Selain itu dalam hal komunikasi, Pokdarwis memberikan ruang diskusi antar anggotanya, serta menampung segala macam bentuk gagasan dari anggota sebagaimana yang juga dijelaskan dalam indikator dialogis. Selain itu hubungan komunikasi antara Pokdarwis dan mitra-mitra juga dapat dibilang ideal.</p> <p>b) Ada ketidaksesuaian dengan konsep poliponi yang memberikan kesempatan untuk mengakomodasi setiap masukan yang disampaikan. Pemerintah seakan tidak memberikan perhatian kepada gagasan yang diberikan Pokdarwis dan tidak memberikan ruang bagi Pokdarwis untuk menyampaikan gagasannya dengan ideal. Walaupun tampak tidak ada intervensi dari pemerintah dalam hal menyampaikan gagasan, tapi tampak ada rasa sungkan dan segan dari Pokdarwis dalam menyampaikan hal sensitif seperti anggaran secara langsung. Artinya tidak ada ruang yang ideal.</p> <p>c) Dikatakan bahwa komunikasi yang terjalin antara Pokdarwis dan masyarakat Bontang Baru kebanyakan bersifat formal dan top-down. Maksud dari top-down adalah komunikasi dilakukan dari atas ke bawah, dalam hal ini yang di atas adalah Pokdarwis selaku komunikator dan masyarakat ada dibawah selaku komunikan. Dalam komunikasi top- down biasanya hanya terjadi pengiriman pesan dari komunikator (atas) kepada komunikan (bawah) tanpa adanya dialog. Hal ini menunjukkan bahwa cara komunikasi yang dilakukan oleh Pokdarwis kepada masyarakat masih belum memenuhi indikator poliponi, sebab belum memberikan ruang diskusi yang ideal pada masyarakat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang majemuk.</p>

3.1.5 Indikator Pendekatan Komunikasi Partisipatif: Karnaval

Indikator Karnaval menekankan pada hubungan informal yang terjalin antara anggota kelompok masyarakat. Indikator ini mengindikasikan bahwa dalam suatu kelompok masyarakat telah terjadi interaksi informal seperti candaan dan humor. Biasanya anggota kelompok didorong untuk melakukan interaksi yang tidak serius dan ringan (Servaes dalam Rahim 2004). Indikator ini masih

belum tampak jelas dalam hubungan komunikasi yang dibentuk oleh Pokdarwis Bontang baru Bersinar kepada masyarakat Bontang Baru. Sesuai dengan pernyataan Hajar, Sekertaris Pokdarwis Bontang Baru Bersinar:

“Sosialisasi ke warga mostly formal. Sebagian warga lebih percaya ke orang yang berseragam karena dianggap berkuasa, kalau pakai biasa bisa dimintain uang sama mereka.” (Wawancara, 28 Februari 2023).

Hal ini juga terlihat dari pernyataan I Gede Astriawan, bahwa Pokdarwis melakukan sosialisasi program pada masyarakat dengan Cara yang formal, seperti pertemuan dan rapat, serta pemberian informasi melalui grup Whatsapp *official* kelurahan.

“Pertama, lewat pertemuan ke seluruh RT, ada 28 RT. Terus lewat Whatsapp grup kelurahan kami gencarkan terus, habis itu tindakan. Pertemuannya dengan warga memang tidak menyeluruh, tapi terkhusus. Misal untuk kelompok nelayan, kami pinjam Gedung Perikanan, kerjasama untuk penyuluhan dampak wisata terhadap Tanjung Limau.” (Wawancara, 28 Februari 2023).



Gambar 6. Rapat bersama TNK

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis

Indikator terlihat pada hubungan Pokdarwis dengan mitra mereka yang dalam hal ini adalah TNK.. Pada beberapa kesempatan hubungan yang tercipta bersifat formal apabila yang diberikan berupa arahan atau bimbingan binaan, contohnya pada saat penulis mengikuti kegiatan yang diinisiasi oleh TNK. Segala bentuk interaksi komunikasi yang dilakukan hampir semuanya formal. Kala itu TNK melakukan penyuluhan tentang peningkatan nilai jual produk di kawasan wisata. Namun interaksi yang terjadi lebih banyak bersifat informal yang berupa diskusi perencanaan program kerjasama dengan TNK.

Indikator karnaval juga tampak dalam komunikasi antar anggota Pokdarwis, sebagaimana yang digambarkan oleh Hajar:

“Jadi Pak Gede itu lebih ke pendekatan persuasive, jadi lebih ke ajakan, negosiasi secara personal, dan ketika ada masalah antar anggota beliau tidak melibatkan forum karena saya juga mencari hal itu. Makanya pak Gede selalu PC (Privat Chat) kalau pendapat anggotanya nggak diterima dan mengatakan kalau pendapat kamu itu nggak salah dan itu sudah tugas pengurus inti.” (Wawancara, 28 Februari 2023).

I Gede selaku Ketua Pokdarwis, tampaknya berusaha melakukan pendekatan informal apabila terdapat masalah dalam kepengurusan. IA melakukan komunikasi antar pribadi melalui media pribadi untuk membahas masalah yang terjadi di forum. Dari hasil pengamatan penulis, interaksi yang terjadi antara Pokdarwis dan masyarakat belum masuk kedalam tahap karnaval yang terlihat interaksi di lapangan banyak menggunakan jenis pendekatan dengan sosialisasi, bukan diskusi informal. Interaksi formal ini terjadi karena mayoritas masyarakat Bontang Baru yang berprofesi sebagai pekerja aktif yang kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tabel 4. Sintesa Karnaval Secara Teoretis Dan Hasil Temuan Lapangan

Teoretis	Hasil Temuan Lapangan
Indikator Karnaval menekankan pada hubungan informal yang terjalin antara anggota kelompok masyarakat. Indikator ini mengindikasikan bahwa dalam suatu kelompok masyarakat telah terjadi interaksi informal seperti candaan dan humor. Biasanya anggota kelompok didorong untuk melakukan interaksi yang tidak serius dan ringan.	a) Interaksi yang dibangun antara Pokdarwis Bontang Baru Bersinar dengan masyarakat masih cenderung formal b) Interaksi yang dibangun antara Pokdarwis dengan mitra-mitra cenderung informal. c) Interaksi yang dilakukan antara Ketua Pokdarwis pada anggota saat ada masalah di forum cenderung personal dan informal

3.1.6 Dampak Komunikasi Partisipatif terhadap Ekowisata Bontang Baru

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa komunikasi partisipatif memiliki dampak pada ekowisata di Bontang Baru, namun hasilnya tidak signifikan. Ada perubahan yang terjadi dari perilaku masyarakat bontang baru terhadap kesadaran wisata, seperti masyarakat yang awalnya tidak begitu peduli Akan kebersihan lingkungan sekitar mereka tinggal kini mulai memperhatikan kebersihan dan keindahan tempat tinggal. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara oleh I Gede Astriawan dalam kutipan berikut:

“...BMP ini mangrove terbersih, jadi edukasi sampah sudah sampai di warga. Kita edukasi terus di whatsapp grup. Warga juga mulai menanam bunga dan rajin membersihkan halaman” (wawancara 28 Februari 2023).

Selain itu, masyarakat mulai sadar bahwa wilayah mereka merupakan kawasan wisata sehingga warga yang berlokasi tempat tinggal di sekitar BMP mulai membangun ruko-ruko untuk berjualan di kawasan ekowisata. Hal ini sesuai dengan APA yang diharapkan Akan hadirnya ekowisata yaitu memberi peningkatan ekonomi bagi warga sekitar. Warga juga menyediakan penyewaan tenda karena kawasan BMP kerap dijadikan tempat untuk *camping* oleh wisatawan. Namun, peneliti juga menemukan beberapa kekurangan yang perlu dicatat dalam proses komunikasi partisipatif tentang ekowisata di bontang baru. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang kurang antusias dengan hadirnya ekowisata.

Hasil observasi ini didukung oleh pernyataan dari I Gede Astriawan yang mengatakan bahwa saat ini anggota kelompok batik berkurang, dari yang awalnya berjumlah 10 orang, kini tersisa 3 orang anggota aktif. Selain itu, aktivitas kelompok nelayan juga terhenti saat ini karena kapal yang berjumlah 5 buah tersebut rusak dan kehilangan mesin. Hal ini terjadi karena anggota masyarakat yang terlibat dalam kelompok nelayan tidak serius dalam mengikuti program yang terlihat dari ketidakmampuan mengurus kapal.

Sebagian besar masyarakat Bontang Baru juga hanya menjadi penikmat dan pengunjung dari program ekowisata yang dijalankan Pokdarwis sebagaimana yang disampaikan oleh lurah Bontang Baru, Rully Adi Putra yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya ekowisata namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena kesadaran pariwisata masyarakat masih rendah. Seperti yang diucapkan Rully Adi Putra dalam kutipan berikut:

“...benar yang dibilang karena kesadaran pariwisata rendah banget karena masyarakatnya yang mayoritas pegawai atau karyawan jadi kesadaran menjadi berdaya itu kurang. Kalaupun perubahan itu kayak partisipasi kecil aja kayak mereka sempat bikin program gang hijau dan ya memang susah untuk partisipasi”

Penulis juga menanyakan kepada warga terkait ekowisata Bontang Baru. Fadly (25), seorang warga Bontang Baru yang bertempat tinggal di RT 12 mengatakan tidak memahami konsep ekowisata yang ada di Bontang Baru. Meskipun IA mengetahui adanya BMP sebagai destinasi wisata, namun pemahamannya Akan konsep pariwisata yang diterapkan oleh TNK dan Pokdarwis belum terlihat.

Dalam hal ini, penulis memahami bahwa komunikasi partisipatif berjalan namun kurang efektif. Hal ini bisa terjadi karena pendekatan yang digunakan oleh Pokdarwis kurang tepat, karena yang terlihat pokdarwis tidak menekankan pada aspek dialogis dan karnaval. Masyarakat hanya diminta mengikuti sebagai peserta dan tidak dilibatkan dalam perumusan program.

3.2 Pembahasan Bentuk Komunikasi Partisipatif yang Terjadi di Ekowisata Bontang Baru

Berdasarkan hasil temuan peneliti sebagaimana yang dijabarkan dalam wawancara dengan *key informan* di lokasi penelitian, penulis menemukan bahwa komunikasi partisipatif yang terjadi di ekowisata Bontang Baru belum efektif, disebabkan karena adanya indikator komunikasi partisipatif yang tidak terlaksana dengan semestinya. Pada indikator heteroglasia, hubungan antara pokdarwis dan anggotanya memenuhi karakteristik perbedaan latar belakang dalam hal jenis kelamin, USIA, tingkat pendidikan, status sosial, agama, dan ekonomi. Perbedaan ini tidak memengaruhi keleluasaan anggota untuk berpartisipasi dan berinteraksi dalam setiap agenda yang dilakukan Pokdarwis Bontang Baru Bersinar.

Sementara itu, hubungan pokdarwis dengan kemitraannya juga memenuhi karakteristik heteroglasia yang terlihat dari adanya keterlibatan mitra dalam program ekowisata khususnya TNK yang dijalankan oleh pokdarwis dengan memberikan bantuan yang berupa bimbingan edukasi peningkatan nilai jual ekowisata maupun bantuan berupa dana untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat. Selain TNK, beberapa komunitas lain juga turut andil dalam program ekowisata seperti komunitas lingkungan, Pramuka, serta pihak swasta yang secara tidak langsung memiliki kepentingan terhadap program ekowisata. Sementara itu, indikator heteroglasia dalam hubungan yang terjadi antara pokdarwis dan kelurahan terlihat dari keterlibatan kelurahan untuk membantu dalam hal penyediaan fasilitas.

Disisi lain, indikator heteroglasia tidak sepenuhnya tercipta pada hubungan pokdarwis dan masyarakat. Sebagian masyarakat memang terlibat dalam program, namun pada kasus lain, satu wilayah di Bontang Baru menolak untuk mendengarkan program yang disampaikan oleh pokdarwis, karena beranggapan bahwa pokdarwis bukan bagian dari pemerintah atau kelompok yang memiliki wewenang. Kelompok masyarakat berubah pikiran setelah pokdarwis kembali dengan menggunakan seragam resmi dan mengenakan logo pemerintah. Artinya, masih ada bagian dari masyarakat bontang baru yang melihat latar belakang seseorang, khususnya apabila seseorang atau kelompok tersebut berasal dari kalangan dari seseorang atau kelompok yang memiliki wewenang atau status sosial yang tinggi.

Hal ini tidak sesuai konsep heteroglasia yang mengedepankan hak berbicara setiap manusia tanpa melihat latar belakang seseorang. Seharusnya, siapapun pihak yang terlibat dalam program ekowisata memiliki hak yang Sama untuk menyampaikan pendapatnya [7]. Ketidakkampuan masyarakat untuk terlibat dalam program sebab status sosial sebenarnya bukan kesalahan dari pokdarwis, karena ini merupakan hal normal pada sebagian masyarakat yang melihat orang berstatus sosial tinggi berdasarkan APA yang mereka kenakan. Namun, ini tentu bisa menjadi salah satu masukan untuk pokdarwis bagaimana melakukan pendekatan yang khusus pada setiap masyarakat yang berbeda [8].

Pada indikator dialogis yang dilihat dari hubungan antara pokdarwis dan anggotanya, peneliti menemukan bahwa pokdarwis jelas melakukan dialog dengan anggotanya yang dinilai dari pemberian kewajiban untuk mengusulkan satu program kerja dari setiap divisi pada saat rapat. Sedangkan pada hubungan dengan masyarakat, indikator dialogis terlihat pada kegiatan pokdarwis yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, komunikasi yang tercipta antara masyarakat dan pokdarwis mayoritas bersifat *top-down*, di mana masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan program namun diminta untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program [9]. Namun di kesempatan berbeda, Ketua Pokdarwis melakukan sebuah tawaran secara informal kepada warga sekitar BMP untuk bergabung dalam program yang dijalankan oleh Pokdarwis. Artinya, komunikasi yang tercipta

antara pokdarwis dan masyarakat berbeda antara masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan ekowisata dan yang tidak bertempat tinggal di kawasan ekowisata.

Sementara itu, hubungan antara pokdarwis dan kelurahan, indikator dialogis kehadirannya terindikasi sangat kecil bahkan cenderung tidak ada dialog yang tercipta. Kelurahan tidak dilibatkan dalam perencanaan program keikutsertaan kelurahan dalam pelaksanaan ekowisata juga cenderung kecil. Dialog terjadi apabila pokdarwis telah melakukan fiksasi program dan Akan segera melaksanakan program dengan menghubungi kelurahan apabila memerlukan bantuan dalam hal penyediaan fasilitas. Kelurahan juga terlihat tidak ingin terlibat lebih jauh dalam kegiatan pokdarwis.

Penulis melihat bahwa sebenarnya indikator dialogis dalam komunikasi partisipatif oleh Pokdarwis telah terpenuhi namun hubungan yang tercipta antara pokdarwis dan anggotanya, pokdarwis dan masyarakat, serta hubungan antara pokdarwis dan kelurahan belum sampai pada tahap makna saling berbagi. Pada konsep partisipatif dikatakan berhasil apabila dialog yang tercipta telah berada pada makna saling berbagi.

Pada indikator poliponi, hubungan yang tercipta antara pokdarwis dan anggotanya, penulis menemukan tidak adanya tekanan terhadap anggota untuk menyampaikan pendapatnya, artinya, pokdarwis memberikan ruang diskusi serta menampung segala bentuk gagasan. Sedangkan pada hubungan antara pokdarwis dan kemitraannya juga tampak ideal karena pokdarwis memberikan ruang komunikasi untuk mendengarkan masukan satu Sama lain sesuai dengan konsep poliponi.

Indikator poliponi pada hubungan antara pokdarwis dan pemerintah yang dalam hal ini adalah Dispopar, terlihat tidak tercipta karena pemerintah seakan tidak memberi ruang bagi pokdarwis untuk berbicara dengan ideal. Meskipun tridak ada intervensi dalam penyampaian pendapat, namun terlihat rasa canggung bagi pokdarwis untuk menyampaikan gagasannya yang berarti adanya jarak antara pokdarwis dan Dispopar untuk salinng berbibicara dengan setara. Hal ini tidak sejalan dengan konsep poliponi yang setelah terjadinya dialog Akan menjadi bentuk keterbukaan dan saling memperjelas satu sama lain.

Pada indikator karnaval, hubungan yang tercipta antara pokdarwis dan masyarakat masih mayoritas formal yang terlihat dari Cara pokdarwis yang seringnya dalam menyampaikan suatu program atau penyampaian informasi selalu menggunakan teknik sosialisasi. Namun bersifat ajakan dalam keadaan informal bagi warga yang bertempat tinggal di kawasan ekowisata. Hal yang berbeda terlihat pada hubungan antara pokdarwis dan kemitraannya yang lebih banyak melakukan diskusi informal.

Indikator karnaval juga terlihat pada hubungan antara pokdarwis dan anggotanya dalam menyelesaikan masalah, di mana ketua pokdarwis selalu menggunakan pendekatan informal dalam menyelesaikan masalah atau menghaapi perbedaan pendapat dalam internal pokdarwis yang dalam hal ini, ketua pokdarwis menjalin komunikasi antar pribadi melalui media personal untuk membahas masalah yang terjadi.

3.2.1 Ekowisata Bontang Baru dalam Sudut Pandang Komunikasi Lingkungan

Berdasarkan pemahaman Robert cox, komunikasi lingkungan memiliki dua fungsi utama, yaitu pragmatis yang berarti komunikasi lingkungan memiliki sifat sebagai sarana edukasi dalam memecahkan masalah lingkungan, serta sebagai konstitutif yang mewakili alam dengan mengajak manusia untuk melihat lingkungan sebagai sesuatu yang harus dihargai [10]. Penerapan komunikasi lingkungan adalah salah satu bentuk dalam pembangunan berkelanjutan yang harus disertai pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebelum adanya ekowisata, kawasan mangrove masih menjadi kawasan yang kumuh dan keberadaanya tidak menarik bagi masyarakat. Setelah dikembangkan, kawasan hutan bakau tersebut telah menjadi sarana edukasi bagi wisatawan dan masyarakat setempat. Hadirnya ekowisata adalah bentuk komunikasi lingkungan yang berkonsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada upaya pelestarian lingkungan. Secara tidak langsung, dengan adanya ekowisata menjadi sebuah bentuk kontribusi dalam konservasi baik alam maupun budaya. Ekowisata yang juga kerap disebut sebagai *sustainable tourism* berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Meskipun masyarakat Bontang Baru mayoritas berprofesi sebagai pegawai dan karyawan yang sudah berada di taraf hidup yang baik, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya ekowisata di Bontang Baru mampu memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang berpartisipasi langsung di dalam program ekowisata. Masyarakat yang terlibat juga didorong untuk menghasilkan kemampuan baru dengan adanya program pemberdayaan.

Komunikasi lingkungan yang mengajak manusia untuk melihat alam sebagai sumber kekayaan terlihat dari konsep ekowisata yang memanfaatkan keaslian alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah [4]. Selain itu, keberadaan ekowisata yang menawarkan penanaman mangrove saat ini, telah berbanding terbalik dengan APA yang dilakukan masyarakat dahulu yang menebang mangrove. Penanaman mangrove menandakan bahwa manusia telah melihat alam sebagai sesuatu yang bernilai dan harus dilindungi keberadaannya [11].

3.2.2 Pokdarwis Boba Bersinar dalam Teori Partisipasi

Dalam makna partisipatif, masyarakat dianggap berpartisipasi apabila seseorang atau masyarakat terlibat langsung dan tidak pasif dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu vertikal dan horizontal. Berdasarkan hasil temuan penulis saat melakukan observasi di lapangan, penulis melihat bahwa partisipasi yang terjadi di Pokdarwis Boba Bersinar adalah partisipasi berjenis vertikal, di mana masyarakat terlibat dalam program yang dicanangkan oleh Pokdarwis. Pada kondisi ini, masyarakat merupakan bawahan, mitra, atau pengikut.

Dalam teori partisipasi yang dicetuskan oleh [7], Pemerintah memiliki peran dalam terbentuknya partisipasi masyarakat yang terbagi dalam delapan tingkatan yang diurutkan dari yang tingkat tertinggi ke tingkat terendah. Adapun urutannya adalah *citizen control*, *delegated power*, *partnership*, *placation*, *consultation*, *informing*, *therapy*, dan *manipulation*. Pada penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa tingkat partisipasi pokdarwis terhadap pemerintah berada pada tingkat *partnership*.

Pada tingkat ini, masyarakat berhak untuk melakukan diskusi dengan pemerintah serta atas pengambilan keputusan bersama dikarenakan posisinya sebagai mitra dalam pemerintahan di mana kekuasaan terbagi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, kesepakatan yang terjadi adalah saling membagi tanggung jawab pada perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah.

Lebih lanjut, Sherry membagi kedelapan tingkatan tersebut menjadi tiga kelompok besar, yaitu *Non-Participation*, *Degree of Tokenism*, dan *degree of Citizen Power*. Pada bagian ini, Pokdarwis Boba Bersinar berada dalam kelompok yang menuju kepada tingkat *Degree of Citizen Power* yang memiliki kemampuan untuk melakukan penawaran dan kompromi dengan para pengusaha atau pemilik kepentingan yang lebih tinggi yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola objek kebijakan [7]. Penjelasan diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh I Gede Astriawan yang mengatakan bahwa pokdarwis pada awalnya adalah sebuah paguyuban yang dikembangkan menjadi pokdarwis dengan melakukan pengajuan ke Dispopar. Kebijakan yang dilakukan pokdarwis pun terlaksana tanpa adanya intervensi dari pemerintah di mana pokdarwis diberi kebebasan dalam membuat program kerja dan berkegiatan.

Namun, karena keberadaannya yang lebih rendah dari pemerintah, saran-saran yang disampaikan oleh pokdarwis ke pemerintah sering kali tak digubris. Pokdarwis sudah menyarankan agar pemerintah tidak perlu mengadakan bimbingan teknologi (bimtek) ke luar pulau karena tidak tepat sasaran, dan sebaiknya mengundang ahli untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pokdarwis, namun saran ini tidak didengar oleh pemerintah. Pokdarwis juga menyayangkan bimtek yang dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran karena yang melakukan adalah para pejabat yang tidak terlibat dalam pelaku pariwisata, sehingga ilmu yang diambil tidak dapat diserap oleh pokdarwis. Selain itu, anggaran untuk pokdarwis juga tidak ada dirasakan keberadaannya. Hal ini jelas terlihat bahwa pemerintah memberi wewenang kepada pokdarwis untuk membuat program namun tidak didukung secara penuh.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tentang Ekowisata di Kelurahan Bontang Baru, maka dapat disimpulkan bahwa dalam empat indikator komunikasi partisipatif, Indikator Heteroglasia terlihat pada upaya pokdarwis untuk merangkul berbagai pihak dalam pelaksanaan ekowisata, baik dari sisi pemerintah, kemitraan, dan sebagian masyarakat telah bergabung dalam program yang dijalankan oleh pokdarwis. Anggota internal Pokdarwis yang terlibat juga berasal dari latar belakang agama, suku, ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan yang berbeda. Adapun indikator dialogis ditunjukkan dengan adanya kewajiban untuk mengusulkan program kerja saat rapat internal dan penyelesaian masalah saat perbedaan pendapat. Sedangkan dialogis ke masyarakat ditunjukkan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak wisata pada perekonomian, namun dialog tidak terlihat terjalin antara pokdarwis dan pemerintah. Disisi lain, Indikator poliponi terlihat dari tidak adanya intervensi yang dilakukan pada saat penyampaian pendapat berlangsung oleh pihak-pihak tertentu. Namun, terjadi ketidaksesuaian dengan konsep poliponi yang memberikan kesempatan untuk mengakomodasi setiap masukan yang disampaikan. Pemerintah seakan tidak memberikan perhatian kepada gagasan yang diberikan Pokdarwis dan tidak memberikan ruang bagi Pokdarwis untuk menyampaikan gagasannya dengan ideal. Sementara itu, Indikator karnaval terlihat pada pola komunikasi yang terjadi di antara pokdarwis dengan anggotanya dan hubungan antara pokdarwis dan kemitraan, namun hubungan yang tercipta antara pokdarwis dan pemerintahan masih cenderung formal. Dalam pola teori partisipasi, Pokdarwis Boba Bersinar terlihat menggunakan jenis vertikal kepada masyarakat yang menganggap bahwa masyarakat adalah mitra dan hanya menjalankan program yang telah mereka susun. Sedangkan dalam hubungan partisipasi dengan pemerintah, pokdarwis berada pada tingkat *partnership* pada kelompok *degree of citizen power* yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan penyampaian pendapat serta dalam membuat kebijakan. Pokdarwis sebaiknya melakukan forum terbuka dalam membuat program kerja dengan melibatkan kemitraan, masyarakat, hingga pemerintahan. Selain itu perlu adanya regenerasi dari pokdarwis atau bahkan mereshuffle keanggotaan yang tidak aktif. Pokdarwis diharapkan mampu lebih komunikatif ke masyarakat dan menggunakan pendekatan selain *top-down* kepada masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- [1] Muchtar, K. (2016) 'Penerapan Komunikasi Partisipatif Pada Pembangunan di Indonesia', Jurnal Makna, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.33558/makna.v1i1.795>.
- [2] Sinaga, D., Winoto, Y., & Perdana, F. (2016). Membangun komunikasi partisipatif masyarakat upaya melestarikan tanaman salak lokal di Manonjaya Tasikmalaya. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 4(2), 191-202.
- [3] Wirotomo, P. (2022) *Imajinasi Sosiologi: Pembangunan Sosial*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- [4] Muchtar, K. (2016). Penerapan komunikasi partisipatif pada pembangunan di Indonesia. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya*, 1(1), 20-32. DOI: <https://doi.org/10.33558/makna.v1i1.795>.
- [5] Setiawati, R., & Aji, P. S. T. (2023). Implementasi sapta pesona sebagai upaya dalam memberikan pelayanan prima pada wisatawan di desa wisata pentingsari. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 2(2), 6.

- [6] Handoko, W., Sulaiman, A. I., & Akbar, A. A. S. (2014). Komunikasi Partisipatif dalam Proses Pembangunan Bendungan Matenggeng Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 17(2). DOI: <https://doi.org/10.20422/jpk.v17i2.13>.
- [7] Wijaksono, S. (2013). Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(1), 24-32. DOI: <https://doi.org/10.21512/comtech.v4i1.2679>
- [8] Fadil, F. (2013) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah', *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 2(2).
- [9] Wahyudin, U. (2017). Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan. *Jurnal Common*, 1(2). DOI 10.34010/COMMON.V1I2.576.
- [10] Purwanti, N. P. G. (2014). Kepuasan Anggota Dpd Partai Gerindra Dalam Penggunaan Cmc Sebagai Sarana Komunikasi Internal. *Jurnal e-Komunikasi*, 2(2).
- [11] Susetiawan, S., Mulyono, D. C., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan peran warga masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 4(1), 109-118. <https://doi.org/10.22146/jpkm.27512>.